

Wacana Indonesia

Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se-Indonesia

Good Governance

- ➡ Larangan Persekongkolan dalam Tender: Upaya Mewujudkan *Good Governance*
Alum Simbolon
- ➡ Jelang Pilkada Jilid ke Dua: Demokrasi Kapitalistik vs *Good Governance*
Suraji
- ➡ Ide Keseimbangan dalam Konsep KUHP Baru Indonesia
Rama Putra
- ➡ Penataan Pedagang di Pasar Retail Jakabaring Berdasar Peraturan Walikota Palembang
Dyah Hapsari Eko Nugraheni
- ➡ Menguak Wacana dan Strategi Kekuasaan dari Perspektif Studi Kebudayaan
M. Ridhak Tagwa
- ➡ Upaya Pemerintah dalam Menggalakkan Program Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi
Paska R. Situmorang
- ➡ Perencanaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Relevan dengan Dunia Kerja
Mustari S. Lamada
- ➡ *Government Role In Preventing Disease Hypertension whit Implementing Lifestyle Change*
Jagentar P. Pane
- ➡ Pemberian Rangkuman sebagai Strategi Pembelajaran
Muh. Ilyas Ismail
- ➡ Nilai-B Gempa Bumi Daerah Sulawesi Tenggara dan Sekitarnya Sebagai Upaya Awal Pelayanan yang Baik pada Penanganan dan Mitigasi Bencana
Burhan



Wacana Indonesia

Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se-Indonesia

ISSN : 1858 – 0358

Volume 2, Nomor 2, April 2010

Jurnal Wacana Indonesia Merupakan Jurnal Nasional berdasarkan Surat Keputusan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI) dengan nomor ISSN 1858-0358 tanggal 29 Mei 2007

**Terbit 3 sekali setahun setiap bulan April, Agustus dan Desember
Berisi hasil penelitian, kajian dan analisis kritis Mahasiswa dan Alumni
Pascasarjana se-Indonesia**

Penanggung Jawab:

Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia
(Forum Wacana Indonesia)

Penyunting Ahli (Mitra Bestari):

Prof. Dr. Irwan Abdullah (Antropologi)
Prof. DR. Djalal Tanjung (Ekologi)
Dr. M. Ridhah Taqwa (Sosiologi)
Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen (Studi Islam)
DR. Ir. Rindit Pambayun, MS (Teknologi Pertanian)
Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS (Hukum)
Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum (Hukum)
Prof. Dr. Ir. Zufrizal, DEA (Peternakan)

Redaktur Pelaksana:

Alum Simbolon (Ketua)
Zuhri Humaidi (Wakil Ketua)
Mustari S. Lamada (Sekretaris)
Nova Ekawati (Anggota)
Buyung Haris (Anggota)

Layout dan Cover:

Buyung Haris

Diterbitkan Oleh:

Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia

Sekretariat:

Perumahan Dinas UGM F 13 Bulak Sumur Yogyakarta 55281

Website FWI: www.ppfwi.wordpress.com

Email: pp.fwi2009@gmail.com



Wacana Indonesia

Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se-Indonesia

Daftar Isi/Contents

Daftar Isi
(i - ii)

Editorial
(iii - iv)

Larangan Persekongkolan dalam Tender: Upaya Mewujudkan
Good Governance
Alan Simbolon
(1 - 14)

Jelang Pilkada Jilid ke Dua: Demokrasi Kapitalistik vs *Good Governance*
Suraji
(15 - 24)

Ide Keseimbangan dalam Konsep KUHP Baru Indonesia
Rama Putra
(25 - 34)

Penataan Pedagang di Pasar Retail Jakabaring Berdasar Peraturan
Walikota Palembang
Dyah Hapsari Eko Nugraheni
(35 - 50)

Menguak Wacana dan Strategi Kekuasaan dari Perspektif Studi
Kebudayaan
M. Ridhak Tagwa
(51 - 60)

Upaya Pemerintah dalam Menggalakkan Program Keluarga Berencana dan
Pelayanan Kontrasepsi
Paska R. Situmorang
(61 - 72)

**Perencanaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Relevan
dengan Dunia Kerja**

Mustari S. Lamada

(73 - 84)

**Government Role In Preventing Disease Hypertension whit Implementing
Lifestyle Change**

Jagantar P. Pane

(85 - 98)

Pemberian Rangkuman sebagai Strategi Pembelajaran

Muh. Niyas Ismail

(99 - 110)

**Nilai-B Gempa Bumi Daerah Sulawesi Tenggara dan Sekitarnya sebagai
Upaya Awal Pelayanan yang Baik pada Penanganan dan Mitigasi Bencana**

Burhan

(111 - 120)

Editorial

Pada periode 1980-an, diskursus ilmu sosial di tanah air diramaikan dengan wacana perlunya proses indiginisasi (pribumisasi) konsep dan teori yang datang dari luar. Langkah demikian kian terasa penting dan menjadi keresahan umum di kalangan para peminat kajian sosial dan budaya, karena adanya disparitas yang semakin nampak antara berbagai konsep dan teori tersebut dengan konteks persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Banjir teori yang semenjak satu dasawarsa sebelumnya memperkaya horison dan khazanah perdebatan intelektual, di sisi lain ternyata hanya menjadi semacam kegenitan intelektual yang membosankan. Para ilmuan kita saat itu, dengan seperangkat teori impor yang dimilikinya, nyaris gagal merekomendasikan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Sebab itu, proyek indiginisasi memperoleh antusiasme yang luar biasa sehingga kemudian muncul upaya untuk mengkaji ulang konsep seperti demokrasi, civil society, teori sosial kritis, developmentalisme dan sebagainya. Tujuannya jelas, agar konsep dan teori itu sesuai dengan fenomena yang lokal dan *indiginous*. Konon, proyek indiginisasi itu juga dipicu oleh gerakan postkolonial yang menilai keterbelakangan di negara-negara bekas jajahan disebabkan karena ketergantungannya terhadap negara-negara maju, baik dalam bentuk fisik-material maupun non-material seperti ilmu pengetahuan. Karenanya, Kolonialisme tetap berlanjut tidak dalam artian fisik melainkan dalam bentuk moda berfikir. Lebih lanjut menurut gerakan ini, para intelektual di negara-negara baru merdeka harus bersikap kritis terhadap bangunan teori dan konsep, serta merekonstruksinya baik untuk tujuan praktis maupun untuk membangun karakter bangsa yang lebih bermartabat. Akan tetapi, apapun landasannya upaya indiginisasi merupakan suatu fase penting yang harus diperhatikan dalam sejarah intelektual di tanah air.

Pasca reformasi 1998, dunia intelektualitas kita kembali menghadirkan dinamika yang lebih impresif dengan maraknya penerbitan buku dan jurnal, penyelenggaraan workshop, diskusi publik, penelitian, pekan ilmiah, seminar dan sebagainya. Disorder sosial dan politik mendorong banyak pihak untuk menata kembali format kenegaraan dan kebangsaan yang terbukti rapuh dan korup. Salah satu isu yang mencuat adalah perlunya menata ulang landasan pemerintahan yang didasarkan pada konsep *government* menuju ke konsep *good governance*. Dalam pengertiannya yang singkat, *good governance* dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan di mana persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah (negara), *Civil Society* dan *Economic Society*. Ini dibedakan dengan model *government* yang selama ini dianut pemerintah. Dalam sistem ini negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur persoalan-persoalan publik, sedangkan aktor-aktor di luarnya hanya dapat ikut serta jika direstui negara. Dalam *Good Governance* prinsip pokoknya adalah *deliberatif policy*, yakni pelibatan masyarakat seluas mungkin dalam suatu kebijakan, sehingga pada praktisnya ia memerlukan tiga elemen, yaitu partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Akan tetapi di luar perdebatan tersebut, *good governance* tetap merupakan konsep yang asing, tidak saja bagi dunia akademik melainkan bagi tlatah sosial dan kultural di Indonesia. Kesulitan penterjemahannya ke dalam bahasa Indonesia saja sudah menjadi indikasi fakta tersebut. Meski tidak berarti bahwa konsep *good*

governance menjadi tidak penting. Korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah sudah sedemikian transparan sehingga langkah restrukturisasi harus menyentuh hal yang lebih paradigmatis dan mendasar. Redaksi jurnal *Wacana* kali ini mengangkat tema *good governance*, tidak dalam bentuk pengertian dan diskusi konseptualnya tetapi kami menfokuskan diri pada praktek dan tantangannya di Indonesia. Edisi nomor ini memuat 10 tulisan, di antaranya; 1) *Larangan Persekongkolan dalam Tender; Upaya Mewujudkan Good Governance (Alum Simbolon)*, 2) *Jelang Pilkada Jilid ke Dua; Demokrasi Kapitalistik Vs Good Governance (Suraji)*, 3) *Ide Keseimbangan dalam Konsep KUHP Baru di Indonesia (Rama Putra)*, 4) *Penataan Pedagang di Pasar Retail Jakabaring Berdasar Peraturan Walikota Palembang (Dyah Hapsari Eko Nugraheni)*, 5) *Menguak Wacana dan Strategi Kekuasaan dari Perspektif Studi Kebudayaan (M. Ridha Taqwa)*, 6) *Upaya Pemerintah dalam Menggalakkan Program Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi (Paska R. Situmorang)*, 7) *Perencanaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang Relevan dengan Dunia Kerja (Mustari S. Lamada)*, 8) *Government Role In Preventing Disease Hypertension whit Implementing Lifestyle Change (Jagentar P. Panc)*, 9) *Pemberian Rangkuman sebagai Strategi Pembelajaran (Muh. Ilyas Ismail)* dan 10) *Nilai-B Gempa Bumi Daerah Sulawesi Tenggara dan Sekitarnya sebagai Upaya Awal Pelayanan yang Baik pada Penanganan dan Mitigasi Bencana (Burhan)*.

Tulisan-tulisan di atas menyentuh persoalan hukum, politik, pendidikan dan kesehatan, akan tetapi dengan intensi dasar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Suatu hal yang menjadi elemen pokok dari *good governance*. Selamat membaca!
(Zuhri Humaidi)

Yogyakarta, 17 April 2010

Salam Redaksi

PERENCANAAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG RELEVAN DENGAN DUNIA KERJA

Mustari S. Lamada

Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar
(mustarilamada@yahoo.com)

ABSTRAK

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pengembangan kurikulum SMK antara lain (1) Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum; (2) prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian; (3) prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum; (4) prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat; dan (5) prinsip efektivitas; yakni usaha yang dilakukan dengan pengembangan kurikulum yang tepat sasaran, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kata Kunci: Kurikulum, Pengembangan, Relevansi, SMK.

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang didalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran. Kemudian inovasi-inovasi tersebut diperkuat dengan berbagai kebijakan. Secara spesifik makalah ini menyajikan inovasi kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja.

Inovasi merupakan suatu ide yang dituangkan dan bersifat baru, walaupun sesungguhnya tidak ada sesuatu hal yang baru seutuhnya tetapi merupakan penyesuaian dan perbaikan dari hal yang telah ada. Karakteristik suatu inovasi adalah; kreatif, baru, praktis, perubahan nilai, ekonomis, dan merupakan suatu terobosan. Dan lingkup inovasi terdiri dari tiga bagian yaitu inovasi struktur, inovasi materi (materi teknologi informasi dan komunikasi untuk SMU tahun

2004), dan inovasi proses (e-learning) melalui tahapan *knowledge, persuasion, decision, implmentation, dan confirmation* (Rogers, 1983: 164)

Kebijakan Pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permen No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Permen No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kebijakan-kebijakan tersebut di atas merupakan landasan dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan baru mengenai pemberlakuan kurikulum yang dikenal dengan istilah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dengan batas akhir penerapan di sekolah pada tahun ajaran 2009/2010.

PRINSIF PENGEMBANGAN KURIKULUM SMK

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum.

Ditulisikan oleh Asep Herry Hernawan dkk (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis).

2. Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.
3. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
4. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.

LANDASAN FILOSOFIS PENGEMBANGAN KURIKULUM SMK

Pendidikan nasional di negara kita dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Sedikitnya ada enam masalah pokok sistem pendidikan nasional sistem pendidikan nasional:

- a. menurunnya akhlak dan moral peserta didik,
- b. pemerataan kesempatan belajar,
- c. masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan,
- d. status kelembagaan,
- e. manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional,
- f. sumber daya yang belum profesional.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan sistem pendidikan, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Bila sebelumnya

pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangannya berada pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Kantor Dinas Pendidikan Nasional pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata organisasi maupun lingkungannya, dan harus mendukung pula misi pendidikan nasional (Diah Harianti, 2007).

Perubahan seperti tersebut di atas berkaitan dengan kurikulum yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Diah Harianti, 2007). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian kelompok pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas kurikulum SMK maka berbagai hal diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang dikembangkan, sampai kita mengenal yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN KEJURUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. Perbedaan tersebut dapat dikaji dari tujuan pendidikan, substansi pelajaran, tuntutan pendidikan dan lulusannya. Apabila ditinjau dari sisi tujuan Pendidikan Kejuruan maka Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejurumannya.

Dari tujuan pendidikan kejuruan tersebut mengandung makna bahwa pendidikan kejuruan di samping menyiapkan tenaga kerja yang profesional juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program kejuruan atau bidang keahlian.

Apabila dilihat dari konteks ketenagakerjaan maka pendidikan kejuruan seyogyanya lebih memfokuskan usaha pada komponen pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan potensi psikomotorik manusia secara optimal. Meskipun pada dasarnya hubungan antara pendidikan kejuruan dan kebijakan ketenagakerjaan adalah hubungan yang didasari oleh kepentingan ekonomis, tetapi harus selalu diingat bahwa hubungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini diartikan bahwa pendidikan kejuruan, dengan dalih kepentingan ekonomi, tidak seharusnya hanya mendidik anak didik dengan seperangkat skill atau kemampuan spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, karena keadaan ini tidak memperhatikan anak didik sebagai suatu totalitas. Mengembangkan kemampuan spesifik secara terpisah dari totalitas pribadi anak didik, berarti memberikan bekal yang sangat terbatas bagi masa depannya sebagai tenaga kerja.

Apabila ditinjau dari aspek peserta didik maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih memfokuskan pada peserta didik yang berkeinginan memiliki kemampuan keterampilan vokasi. Usia peserta didik secara umum pada rentang 15/16 – 18/19 tahun, atau peserta didik berada pada masa remaja.

Ditinjau dari aspek ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (*value of return*) dari hasil pendidikan kejuruan. Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, baik swasta maupun pemerintah semestinya pendidikan kejuruan memiliki konsekuensi investasi lebih besar daripada pendidikan umum. Di samping itu, hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (*rate of return*) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi tersebut dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.

Pendidikan kejuruan merupakan upaya mewujudkan peserta didik menjadi manusia produktif, untuk mengisi kebutuhan terhadap peran-peran yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa lulusan pendidikan kejuruan seharusnya memiliki nilai ekonomi lebih cepat dibandingkan pendidikan umum.

PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

Dalam naskah akademik Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan bahwa terdapat 6 aspek yang patut dicermati dalam meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Dijelaskan tentang pendidikan kecakapan hidup berisi uraian tentang penerapan kecakapan akademik, pribadi, sosial, dan kecakapan vokasional. Kecakapan akademik, personal, dan social diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Kecakapan vokasional diintegrasikan kedalam mata pelajaran kewirausahaan serta unit produksi, berorientasi kedalam produk dan jasa. Program pembelajaran kecakapan hidup disusun dalam dokumen tersendiri tetapi harus merupakan satu kesatuan dengan dokumen kurikulum SMK. (Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2005: 37-39).

Dalam pelaksanaannya Pendidikan Kecakapan Hidup tertuang dalam pengembangan orientasi kurikulum SMK yang telah mengalami rekonstruksi dan rekulturasasi, antara lain sebagai berikut:

1. Orientasi pendidikan dan pelatihan dikembangkan dari azas penyediaan (*supply driven*) menjadi azas permintaan pasar (*market driven*),
2. Pendidikan dan pelatihan berorientasi pada kecakapan hidup (*life skill*) dan berwawasan lingkungan,
3. Lulusan SMK harus bisa bekerja secara mandiri (wiraswasta) atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada,
4. Penyusunan kurikulum menggunakan pendekatan berbasis luas dan mendasar (*broad based*), berbasis kompetensi (*competency-based*) dan berbasis produksi (*productionbased learning*) multikurikulum di SMK bagi yang memerlukan,
5. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lebih fleksibel dan permeable, melalui penyediaan multikurikulum, dengan prinsip *multi entry/exit*.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dengan pola pendidikan sistem ganda (PSG),
7. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat (orang tua, dunia kerja dan sebagainya),
8. Bersinergi dengan jenjang dan jenis pendidikan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, secara makro kurikulum SMK harus dapat dijustifikasi melalui beberapa langkah perencanaan. Langkah perencanaan yang dimaksud adalah:

- a. deskripsi konteks dan kebutuhan program pendidikan kejuruan,
- b. deskripsi misi yang harus dibawakan oleh pendidikan kejuruan,
- c. deskripsi kebutuhan tujuan umum dan sasaran program,
- d. deskripsi kriteria hasil dan manfaat program yang direncanakan
- e. deskripsi prosedur dan kordinasi dalam implementasi program.

Setelah kelima langkah tersebut diambil maka selanjutnya program diimplementasikan dan dievaluasi (Sukanto, 1988).

Dengan demikian perencanaan yang dikembangkan merupakan suatu kerangka pemikiran yang komprehensif yang dapat dipakai secara terpadu baik untuk awal perencanaan maupun untuk langkah pengembangan. Dengan demikian akan terlihat kaitan antara langkah perencanaan di satu pihak dan ketersediaan data informasi dunia kerja di pihak lain.

Dalam rangka justifikasi pengadaan program pendidikan kejuruan yang baru, seharusnya diperoleh informasi lapangan yang jelas tentang aspek social ekonomi masyarakat termasuk lapangan atau kesempatan kerja setelah program pendidikan kejuruan menghasilkan output (Sukanto, 1988). Informasi yang dimaksud termasuk data mengenai (1) konteks lapangan kerja, (2) kebutuhan tenaga kerja yang terperinci dan spesifik, (3) kondisi angkatan kerja saat tertentu, (4) ketersediaan program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

SUBTANSI KURIKULUM PENDIDIKAN KEJURUAN

Setelah membahas tentang karakteristik pendidikan kejuruan, landasan kurikulum pendidikan kejuruan maka substansi kurikulum dari pendidikan kejuruan harus tercermin dari beberapa aspek. Aspek yang dimaksud adalah aspek orientasi kurikulum, *Justifikasi*, focus, standar keberhasilan,

Orientasi dimana Kurikulum pendidikan kejuruan harus berorientasi pada proses dan hasil atau lulusan. Keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan tidak hanya diukur dengan keberhasilan pendidikan peserta didik di sekolah saja, tetapi juga dengan hasil prestasi kerja dalam dunia kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Finch dan Crunkilton (1984: 12) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi terhadap proses (pengalaman dan aktivitas dalam lingkungan sekolah) dan hasil (pengaruh pengalaman dan aktivitas tersebut pada peserta didik).

Justifikasi untuk program pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di lapangan kerja atau di dunia usaha dan industri. Dasar

kebenaran/justifikasi pendidikan kejuruan menurut Finch dan Crunkilton (1984), meluas hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada peserta didik, maka dukungan bagi kurikulum tersebut berasal dari peluang kerja yang tersedia bagi para lulusan.

Fokus kurikulum dalam pendidikan kejuruan tidak terlepas pada pengembangan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu, tetapi harus secara simultan mempersiapkan peserta didik yang produktif. Finch dan Crunkilton (1984 : 13) mengemukakan bahwa : Kurikulum pendidikan kejuruan berhubungan langsung dengan membantu siswa untuk mengembangkan suatu tingkat pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai yang luas. Setiap aspek tersebut akhirnya bertambah dalam beberapa kemampuan kerja lulusan. Lingkungan belajar pendidikan kejuruan mengupayakan di dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik, keahlian meniru, sikap dan nilai serta penggabungan aspek-aspek tersebut dan aplikasinya bagi lingkungan kerja yang sebenarnya.

Kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan kejuruan diukur dari keberhasilan peserta didik di sekolah, mengenai beberapa aspek yang akan dia masuki. Penilaian keberhasilan pada peserta didik di sekolah harus pada penilaian sebenarnya atau kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain bahwa dalam standar keberhasilan sekolah harus berhubungan erat dengan keberhasilan yang diharapkan dalam pekerjaan, dengan kriteria yang digunakan oleh guru dengan mengacu pada standar atau prosedur kerja yang telah ditentukan oleh dunia kerja (dunia usaha dan dunia industri).

Oleh karena itu kurikulum pendidikan kejuruan dalam implementasi kegiatan pembelajaran perlu didukung oleh fasilitas belajar yang memadai, karena untuk mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif, diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik. Bengkel kerja dan laboratorium adalah kelengkapan utama dalam sekolah kejuruan yang harus ada sebagai fasilitas bagi peserta didik di dalam mengembangkan kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut maka beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Dalam menyusun kurikulum diperlukan sebuah kajian yang komprehensif tentang kebutuhan dunia kerja ke depan,
2. Penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kontinuitas, fleksibilitas, efektif, efisien dan prinsip relevansi dengan dunia kerja,
3. Penyusunan kurikulum harus mengikuti kaidah perencanaan yang baik, kebutuhan, misi yang diemban, sasaran program, manfaat, serta organisasi dalam implementasi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Blank, W.E. (1982). *Handbook For Developing Competency Based Training Programs*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Block, J.H. (1971). *Mastery learning : Theory and Practice*. New York : Holt, Rinehart and Wiston. Inc.
- Brady, Laurie. (1990). *Curriculum Development: Third Edition*. London. Prentice Hall. Sydney.1990.
- Calhoun, C.C. dan Finch, A.V. (1982). *Vocational Education : Concept and Operations*. California : Wads Worth Publishing Company.
- Curtis, T.E. dan Bidwell, W.W. (1976). *Curriculum and Instruction for Emerging Adolescents*. New York : State University of New York at Albany.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Tata Busana*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Diah Harianti, *Naskah Akademik Kebijakan Kurikulum*, Depdiknas, 2007.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia : Membangun Manusia Produktif*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- (2003). *Standar Kompetensi Nasional Bidang Keahlian Tata Busana*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Djohar, A. (2003). *Pengembangan Model Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- Djojonegoro, W. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia : Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta.
- Drake, Susan M., *Creating Standards-Based Integrated Curriculum*. California: Corwin Press, Inc., 2007
- Evarinayanti. (2002). *Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training)*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Finch, C. dan Crunkilton, J.R. (1984). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education : Planning, Content and Implementation*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Glatthom A. (1994). *Developing A Quality Curriculum*. Alexandria: ASCD. 1994.
- Gronlund, N.E. (1977). *Constructing Achievement Test*. Englewood Cliffs : Prentice-Hall. Inc.
- Hasan, S.H. (1988). *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta : PPLPTK.
- Ibrahim, R. dan Sukmadinata, N.S. (1996). *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ibrahim. (2002). Standar Kurikulum Satuan Pendidikan dan Implikasi bagi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi. *Mimbar Pendidikan*. Jurnal Pendidikan. No.1 Tahun XXI tahun 2002. Bandung. University Press UPI. 2002.
- Indonesia Australia Partnership for Skills Development Program. (2001). *Competency Based Training*. West Java Institutional Development Project.
- Masriam Bukit. (1994). Peran Wilayah Dalam Pengembangan Kurikulum. *Inovasi Kurikulum; Jurnal HIPKIN*. Volume 1, Nomor 1, Februari 2004. Bandung. 1994.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Permen No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Permen No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instructional*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994.
- Rogers. M. Everett. (1983). *Diffusion of Inovations: Third Edition*. London. Collier Macmillan Publishers.
- Sleeter, Christine E., *Un-Standardizing Curriculum, Multicultural Teaching in the Standard-Based Classroom*. Teachers College, Columbia University, 2005.
- Soedijarto, *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dan Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Sukanto, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Dirjen Dikti, Jakarta, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta. Medya Duta. 2004.

W.B. Ragan, *Modern Elementary Curriculum*. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1962